

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan 2x11 Enam Lingkung

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN 2x11 ANAM LINGKUANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

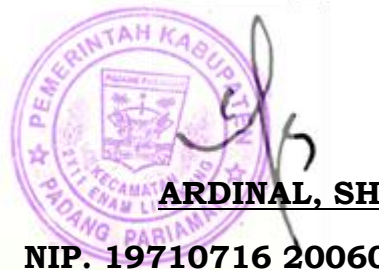
Puji dan syukur ke hadirat Allah ,SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman yang memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025, dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhi target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Sicincin, 20 Januari 2026

Camat 2x11 Anam Lingkuang



ARDINAL, SH
NIP. 19710716 200604 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Gambaran Umum		2
C. Tugas Pokok dan Fungsi		6
D. Issu Strategis (Strategic Issued)		11
E. Sistematika Penulisan		13
BAB II PERENCANAAN KINERJA		14
A. Rencana Strategis		14
1. Visi		15
2. Misi		16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis		18
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)		20
C. Perjanjian Kinerja (PK)		24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		27
A. Pengukuran Kinerja		27
B. Capaian Kinerja		28
C. Realisasi Anggaran		99
BAB IV PENUTUP		108
A. Simpulan		108
B. Langkah Kedepan		108

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang Jumlah Pegawai Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang	5
Tabel 1.3	Isu Strategis	11
Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026	18
Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja PerubahanTahun 2025	26
Tabel 3.1	Pengukuran Dengan Skala Ordinal	28
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026/ Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025	30
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029/ Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	31
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal tahun 2025	32
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2025	33
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal tahun 2025	34
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2025	35
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi IKU sasaran Strategis 1 Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026	37
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi IKU sasaran Strategis 1 Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029	38

Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi IKU terhadap sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dan Tahun 2025	38
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan target jangka menengah	39
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1	39
Tabel 3.13	Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	40
Tabel 3.14	Realisasi kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	41
Tabel 3.15	Analisis Program dan Kegiatan tiap Indikator Kinerja	42
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025	44
Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang	45
Tabel 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Tahun 2024 dengan Tahun 2025	45
Tabel 3.19	Perbandingan realisasi capain IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	46
Tabel 3.20	Program dan Kegiatan pendukung sasaran 2	47
Tabel 3.21	Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47
Tabel 3.22	Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	48
Tabel 3.23	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja	50

Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025	52
Tabel 3.25	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025	53
Tabel 3.26	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025	53
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	54
Tabel 3.28	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3	54
Tabel 3.29	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55
Tabel 3.30	Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58
Tabel 3.31	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja	58
Tabel 3.32	Analisis Efisiensi tiap Indikator Kinerja	60
Tabel 3.33	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025	61
Tabel 3.34	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025	61
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	62
Tabel 3.36	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4	62
Tabel 3.37	Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63
Tabel 3.38	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65

Tabel 3.39	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65
Tabel 3.40	Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66
Tabel 3.41	Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67
Tabel 3.42	Analisis Program dan Kegiatan tiap Indikator Kinerja	67
Tabel 3.43	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	68
Tabel 3.6.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2025	74
Tabel 3.6.2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2024 dengan Tahun 2025	75
Tabel 3.6.3	Perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	75
Tabel 3.6.4	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1	76
Tabel 3.6.5	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penanganan Ketrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi Dan Dilaporkan	77
Tabel 3.6.6	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	77
Tabel 3.6.7	Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	78
Tabel 3.6.8	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja	80
Tabel 3.6.9	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025	82
Tabel 3.6.10	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2025	83

Tabel 3.6.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025	83
Tabel 3.6.12	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	84
Tabel 3.6.13	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2	84
Tabel 3.6.14	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85
Tabel 3.6.15	Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86
Tabel 3.6.16	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja	86
Tabel 3.6.17	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	88
Tabel 3.6.18	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2025	89
Tabel 3.6.19	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025	89
Tabel 3.6.20	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	90
Tabel 3.6.21	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3	91
Tabel 3.6.22	Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91
Tabel 3.6.23	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92
Tabel 3.6.24	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93
Tabel 3.6.25	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93
Tabel 3.6.26	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94
Tabel 3.6.27	Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94
Tabel 3.6.28	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja	95
Tabel 3.6.29	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	3
Gambar 3.1	Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam upaya Penanganan Kantrantibmas dan Peninjauan Bencana Banjir	41
Gambar 3.2	Peringatan HUT RI Kecamatan 2x11 Anam Lingkung	42
Gambar 3.3	Pelayanan pada masyarakat	48
Gambar 3.4	Kafilah se-Kec. 2x11 Anam Lingkuang pada acara MTQ Nasional Ke 49 Tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Lubuk Pandan	49
Gambar 3.5	SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	49
Gambar 3.6	Acara Musrenbang Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025	56
Gambar 3.7	Kegiatan PKK Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025	57
Gambar 3.8	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari-Nagari se-Kec. 2x11 Anam Lingkuang	58
Gambar 3.9	Rapat Evaluasi Kinerja	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2025
- Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan Camat tahun 2025
- Lampiran 3 : SK IKU Tahun 2025
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Review Tahun 2025 dari Inspektorat

A Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun pelaporan ini terdapat kondisi transisi kepemimpinan daerah yang menyebabkan beririsan antara masa jabatan Bupati sebelumnya dengan Bupati yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan juga mengalami peralihan.

Pada awal tahun anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terdahulu yaitu ***"Padang Pariaman Berjaya (Padang Pariaman unggul berkelanjutan religius sejahtera dan berbudaya)"***.

Selanjutnya setelah pelantikan Bupati yang baru dan ditetapkannya dokumen perencanaan periode berikutnya , maka arah kebijakan dan sasaran strategis menyesuaikan dengan Renstra periode yang baru dengan Visi Misi ***" Membangun Padang Pariaman maju dan sejahtera"*** . Dengan demikian, dalam satu tahun pelaporan terdapat penggunaan dua dokumen Renstra sebagai dasar pelaksanaan kinerja. Kondisi ini mengakibatkan sebagian indikator kinerja dan target capaian mengacu pada dokumen Renstra yang lama, sementara sebagian lainnya menyesuaikan dengan Renstra yang baru. Namun demikian secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

Gambar 1.1
Peta Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang



Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang merupakan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara geografis merupakan daerah dataran Tinggi. Letak geografis pada **100°16'00"** Bujur Timur dan **0° 39'00"** Lintang Selatan dengan luas daerah **36,25 KM²** dengan ketinggian **±25-375 m dpl** dari permukaan laut dengan jumlah penduduk **19.653** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **9.835** jiwa dan Perempuan **9.818** jiwa.

Ibu Kota Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berada pada Nagari Lubuak Pandan dimana sebelumnya ibu kota 2x11 Anam Lingkuang adalah Nagari Sibincin. Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang terdiri dari 3 Nagari. Nagari-nagari tersebut terdiri atas :

- (1) Nagari Sibincin
- (2) Nagari Sungai Asam
- (3) Nagari Lubuak Pandan

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman yaitu Anam Lingkuang, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan VII Koto dan Kecamatan 2x11 Kayutanam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anam Lingkuang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 2x11 Kayutanam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan VII Koto dan Kecamatan Anam Lingkuang

Jumlah penduduk Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah **19.653** jiwa yang terdiri dari **9.835** orang laki-laki dan **9.818** orang perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

NO	NAGARI	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	SICINCIN	4.932	4.938	9.870
	1. Pauh	1.536	1.577	3.113
	2. Bari	1.027	1.007	2.034
	3. Sicincin	1.662	1.638	3.300
	4. Ladang Laweh	707	716	1.423
II	SUNGAI ASAM	2.077	2.062	4.139
	1. Sungai Asam	1.171	1.158	2.329
	2. Sigaung	583	572	1.155
	3. Ganting	323	332	655

III	LUBUK PANDAN	2.826	2.818	5.644
	1. Balai Satu	458	485	943
	2. Kiambang	812	763	1.575
	3. Padang Bukik	620	649	1.269
	4. Kampung Panyalai	409	383	792
	5. Kampung Guci	527	538	1.065
	JUMLAH	9.835	9.818	19.653

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II (dua) Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Jumlah Penduduk yang terbanyak dikecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah Nagari Sicincin sebanyak **9.870** jiwa dan Penduduk yang paling sedikit di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang yaitu Nagari Sungai Asam sebanyak **4.139** Jiwa, jumlah penduduk yang ada di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang semua **19.653** jiwa.

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI
KANTOR CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN ESELON	KET
1	2	3	4	5	6
1	ARDINAL, SH	Pembina / IV.a	S1	Camat / III.a	
2	HERI KURNIA, SKM,M,Si	Pembina / IV.a	S2	Sekcam /III.b	
3	ARMAYANTI, S.Keb	Penata Tingkat II / III.d	S1	Kasi PEM / IV.a	
4	AINUL MARDHIYAH, S.Sos	Penata / III.c	S1	Kasi Yanum/ IV.a	
5	ROSNITA,S.Sos	Penata / III.c	S1	Kasi Trantib / IV.a	
6	ALAMIN MOURBAS, ST	Penata Tingkat I / III.d	S1	Kasi Kesra / IV.a	

7	AZIMAR, SE, MM	Pembina/ IV.a	S2	Kasi Pemberdayaan Masyarakat/IV.a	
8	ISMAWELLI, SP	Penata Muda TK.I / III.b	S1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan/IV.b	
9	YOSI INDRAYENI, S.Sos	Penata Muda TK.I/ III.b	S1	Kasubag Umum dan Kepegawaian /IV.b	
10	AYSUSI HARIPAN SUVI, A.Md	Pengatur /II.d	D III	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	
11.	HERMAN NURKHALIS	Pengatur /II.d	SLTA	Pengadministrasian Umum	
12.	YANDRA SAPUTRA,SIP	IX	S1	Penata Layanan Operasional	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Jumlah PNS di Pemerintahan Kantor Camat 2 X 11 Anam Lingkuang sebanyak 11 Orang. Dengan rincian Tenaga yang berpendidikan S2 2 Orang ,Tenaga S1 7 Orang, Tenaga DIII 1 Orang, dan SMA 1 Orang dan Jumlah PPPK di Pemerintahan Kantor Camar 2 X 11 Anam Lingkuang sebanyak 1 Orang dengan Pendidikan S1.

Tingkat Pendidikan PNS ini menunjukan kualitas sumber daya manusia . Secara umum kualitas PNS di Kantor camat 2x11 Anam Lingkuang cukup baik walaupun jumlah tenaga yang masih kurang.



Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-

undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- 6. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- 7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati
- 8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- 9. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;

- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu :
- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek :
- a. Rekomendasi;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pembinaan;
 - d. Pengawasan;
 - e. Fasilitasi;
 - f. Penetapan;
 - g. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strstrategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat nanti. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

Tabel. 1.3
Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Permasalahan Strategis
1.	Akuntabilitas dan Keuangan	Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran dan efesiensi
2.	Kualitas Pelayanan Publik	1. Sarana dan prasarana belum memadai 2. Belum tersedianya ruang publik bagi masyarakat 3. Keterbatasan Sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun

No.	Isu Strategis	Permasalahan Strategis
		kualitas sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat dalam pengelolaan administrasi di kecamatan 4. Belum ada batasan dan SOP yang jelas terkait pelayanan sehingga membuat pelayanan masyarakat kurang maksimal

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rancangan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 Tentang perbaikan dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang menyajikan capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang pada Januari sampai dengan September 2025 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2021-2026, dan terjadi transisi kepemimpinan daerah yang mengakibatkan adanya penyesuaian arah kebijakan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, selain tetap melanjutkan Implementasi Renstra periode sebelumnya Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang juga mulai mengimplementasikan Renstra yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan kepala daerah yang baru sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan tahun 2025-2029. Dengan demikian, dalam tahun berjalan (Oktober-Desember tahun 2025), terdapat perubahan dan penyesuaian indikator kinerja, sasaran strategis, serta target capaian yang mengakomodasi keberlanjutan program sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan periode selanjutnya.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

Pada penyusunan LKJIP Tahun 2025 ini merupakan masa transisi kepemimpinan kepala daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tetap fokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 dan untuk triwulan 4 berpedoman pada RPJMD 2025-2029.

• Rencana Strategis 2021-2026

1. Visi

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi juga merupakan suatu keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD sesuai dengan tugas fungsi SKPD sejalan dengan pernyataan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2021 - 2026 sebagai berikut

“PADANG PARIAMAN BERJAYA.”

Visi tersebut memiliki empat kata kunci yakni Menjadikan Kabupaten unggul berkelanjutan, Religius, sejahtera dan berbudaya, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. ***Unggul berkelanjutan*** yang dimaksud adalah memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- b. ***Religius*** yang dimaksudkan di sini adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- c. ***Sejahtera*** dalam hal ini dimaksudkan adalah merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- d. ***Berbudaya*** dalam hal ini dimaksudkan adalah merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu

2. Misi

Untuk mencapai Visi “Padang Pariaman Berjaya yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera” ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat bersandi syarak, syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

• Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas** : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Misi yang telah ditetapkan di atas merupakan prioritas yang harus dicapai untuk pencapaian visi Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang. Untuk

mencapai visi dan misi tersebut , dalam DPA Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 telah ditetapkan rencana kinerja keuangan yang mencakup 6 program 13 kegiatan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis, adapun tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 dapat diuraikan seperti :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Presentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan
			Meningkatkan peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan	Presentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap pembangunan Daerah
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari inspektorat

Tabel 2.2
Tujuan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025 mengalami beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan masa pergantian kepemimpinan Bupati Padang Pariaman, sehingga tahun ini juga menjadi masa transisi penyusunan dokumen Renstra Kecamatan tahun periode 2021-2026 menjadi Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Periode 2025-2029. Adapun perubahan dan penyesuaian sasaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas diantaranya dari segi jumlah sasaran

strategis yang semula sebanyak 4 (empat) sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran pada dokumen Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun periode 2025-2029, serta ada beberapa penyesuaian penjabaran sasaran dan indikator sasaran pada dokumen Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun periode 2025-2029 meskipun tidak merubah makna dasar dari sasaran/indikator sasaran dimaksud.

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”.

Sedangkan untuk Misi Bupati Padang Pariaman Tahun 2025-2029 untuk Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 1 (satu) yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dapat dilihat pada Tabel diatas. Adapun penyajian indikator Kinerja Utama Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah sebagai berikut :

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menetapkan rencana tahunan. Setiap organisasi perangkat daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan, sasaran strategis pada RPJMD dan Renstra. Pada Tahun 2025 ini merupakan masa transisi kepemimpinan kepala daerah. Pemerintah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tetap fokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 dan untuk triwulan 4 berpedoman pada Renstra 2025-2029.

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang maka ditetapkan Keputusan Camat 2 X 11 Anam Lingkuang tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan 2x11

Anam Lingkuang Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 tahun 2025, dan IKU Tahun 2025-2029 untuk triwulan 4 Tahun 2025. IKU Kecamatan 2 X11 Anam Lingkuang tahun 2025, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menyelenggarakan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Urusan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
2	Meningkatkan pelayanan publik	Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang dilayanani/jumlah seluruh pelayanan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan		Presentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah partisipasi masyarakat X 100 %	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
4	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Sakip Kecamatan dari Insp ektorat	Hasil Review TIM Sakip Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag umum dan Kepegawaian Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah partisipasi masyarakat X 100 %	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review TIM Sakip Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag umum dan Kepegawaian Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

Pada tabel diatas terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang didasarkan pada dokumen Renstra Kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun Periode 2021-2026 dan Renja awal tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi Pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, berikut dijabarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai berikut :

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan adalah dokumen komitmen resmi yang ditanda tangani di awal tahun oleh pejabat/pegawai Kecamatan (Camat sampai dengan staf), untuk mewujudkan target kinerja, anggaran dan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang di inginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat 2x11 Anam Lingkuang dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan 2x11 Anam Lingsrang tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingsrang akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsrang yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, seperti pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	85
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.	81 (A)

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,60

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Akuntabilitas kinerja periode transisi tahun 2025 ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari angka statistik yang dicapai, tetapi dari sejauh mana integrasi antar perangkat daerah mampu dalam menjembatani capaian akhir Renstra 2021-2026 menuju fondasi baru dalam Renstra 2025-2029. Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025, akuntabilitas kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berkaitan dengan informasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama serta anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah digunakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mendukung pencapaian kinerja tersebut

Berdasarkan Renstra 2021- 2026 berikut Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategi, Indikator Kinerja dan Penanggung jawab
Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	Seluruh Kepala Seksi Kec. 2x11 Anam Lingsuang
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat layanan Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum Kec. 2x11 Anam Lingsuang
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Kasi Pemberdayaan masyarakat Kec. 2x11 Anam Lingsuang
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. 2x11 Anam Lingsuang

Seiring ditetapkannya Rencana Perubahan Tahun 2025, IKU Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang berdasarkan Renstra 2025- 2029 didukung oleh 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Strategi, Indikator Kinerja dan Penanggung jawab
Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Kasi Pemberdayaan masyarakat Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaia n Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
$x > 100$	Sangat Berhasil
$70 < x < 100$	Berhasil
$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

B Capaian Kinerja Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang

Capaian kinerja Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih.

Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja Tahun 2025, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Indikator kinerja utama Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang pada tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021- 2026 semakin menunjukkan perbaikan kinerja, sebagaimana pada tabel berikut:

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2021-2026 dan juga sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Sehingga pada sub bab ini akan disajikan pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan dua dokumen perencanaan tersebut di atas, sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

**Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan
Renstra 2021-2026/ Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	75,11 %	75,11%	Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (85)	B (85)	100 %	Berhasil
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	100%	87,47%	87,47%	Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.	A (81)	BB (75,60)	93,33 %	Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) awal tahun 2025 terealisasi dengan baik hingga triwulan ketiga, sedangkan pada triwulan ke empat tahun 2025 terjadi transisi penyusunan perencanaan akibat

perubahan periode kepemimpinan di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga terjadi perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029/ Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	75,11 %	75,11%	Berhasil
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	100%	87,47%	87,47%	Berhasil
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (75,00)	BB (75,60)	100,8 %	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat sasaran strategis yang mendapat kategori berhasil.

Target dan sasaran tahun 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian sasaran dan indikator kinerja oleh Pemerintah Daerah.

3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

Selanjutnya analisis atas realisasi dan capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2025 terhadap realisasi capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya akan diawali dengan menyajikan pengukuran realisasi dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2021-2026. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2025. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan perjanjian kinerja awal tahun 2025 dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025:

Tabel. 3.4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	%	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	93	100%	99,2	99,2	100	75,11	75,11 %	berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Nilai	100	100%	99,67%	93,80 %	B (85)	B (85)	100	Berhasil
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	%	100%	100%	98%	96,50%	100	87,47	87,47	berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	B+	BB (71,95)	BB (70,05)	A (81)	BB (75,60)	93,33 %	Berhasil

Tabel diatas merupakan penjabaran dari perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025, dimana dokumen tersebut berpatokan pada dokumen Renstra Kecamatan Periode Tahun 2021-2026.

Berikut ini dijabarkan pula tabel perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	N93	100%	99,2%	99,2%	100	75,11	75,11 %	berhasil
2	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	%	N/A	100%	98%	96,50%	100	87,47	87,47%	berhasil
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B+	BB (71,95)	BB (70,05)	BB (75,00)	BB (75,60)	100,8%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari kedua tabel diatas, realisasi kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil interpretasi pada kategori sangat berhasil.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Rencana Strategis

Analisis berikut mengukur perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum

pada Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingsung tahun 2021-2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian Kinerja					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	99,2	99,2	75,11	-	-
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100 %	100 %	99,67 %	85 %	-	-
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100 %	90 %	96,5 %	87,47	-	-
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	BB (74,00)	BB (75,00)	A (81)	BB (77,00)	BB (78,00)	B+	BB (71,95)	BB (70,05)	BB (75,06)	-	-

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian Kinerja					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya Kualitas fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	-	-	-	100	100	100				75,11	-	-
2	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	%	-	-	-	100	100	100				87,47	-	-
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	-	-	-	BB (76,00)	BB (77,00)	BB (78,00)		BB (71,95)	BB (70,05)	BB (75,06)	-	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran dan target indikator kinerja telah disesuaikan dengan dokumen Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029, sehingga target indikator pada Tabel 3.4.2 hanya bisa ditampilkan mulai tahun 2025 saja.

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi sasaran strategis terealisasi sesuai target. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang terealisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sasaran dan indikator kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan target indikator dengan rata-rata persentase interpretasi capaian “sangat berhasil”.

Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.5 Analisis dan Evaluasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bagian ini akan diuraikan analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sebagai parameter keberhasilan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026. Berikut ini uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

	Sasaran 1: <i>Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan</i>
---	---

Sasaran strategis ini terdapat pada kedua Renstra , yang mana pada Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2021-2026 berbunyi “ **Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**” dan pada Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029 berbunyi “ **Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum**”. Meskipun demikian kedua sasaran tersebut sama sekali tidak merubah tujuan Pembangunan kabupaten Padang Pariaman itu sendiri.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan Pelayanan Publik yang cepat dan efisien, Pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lain, serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diwilayah Kecamatan melalui seksi Ketenteraman dan Ketertiban, seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat dan seksi pemerintahan.

Adapun Formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum ditingkat Kecamatan secara keseluruhan}} \times 100 \%$$

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

1) Perbandingan Target dan Realisasi capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara di Tingkat Kecamatan

Tabel. 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi IKU sasaran Strategis 1 Tahun 2025
berdasarkan Renstra 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Capaian 2025			Interprestasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	75,11	75,11	Berhasil

Sedangkan untuk perbandingan target dan realisasi IKU asaran 1 tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi IKU sasaran Strategis 1 Tahun 2025
berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Capaian 2025			Interprestasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	75,11	75,11	Berhasil

Dari kedua tabel diatas, baik itu berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 secara target dan realisasi tidak berubah, yaitu sebesar 100 % sehingga capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran strategis 1 adalah 75,11 % dengan interprestasi “berhasil”, namun perbedaannya terdapat pada sasaran strategis dimana terjadi penyesuaian sasaran strategis pada Renstra 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Kepemimpinan yang baru.

2) Perbandingan Target dan Realisasi capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target Renstra 2021-2026 dengan capaian IKU tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi IKU terhadap sasaran Strategis 1
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian 2025			Kategori / Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	99,2	100	75,11	75,11	Berhasil

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 75,11 % dari Tahun 2024 99,2 %. Hal ini terjadi karena pengetatan anggaran yang tersedia di Kecamatan. Meskipun demikian, setiap rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan dengan baik dan tidak mengurangi kinerja kegiatan yang ada pada Kecamatan itu sendiri.

3) Perbandingan Realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan target Jangka Menengah Kecamatan

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Jumlah Penyelenggara n Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,2	75,11

a) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan 2x11 Anam Lingsung tahun 2025 (Tabel 3.5.5)

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

1.1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang (Tabel 3.5.6)

Tabel 3.13
Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan

Gambar 3.1
Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam upaya Penanganan Kantrantibmas dan
Peninjauan Bencana Banjir



1.1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Tabel 3.14
Realisasi kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	orang

Gambar 3.2
Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-80 di Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang



Tabel 3.15

Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T INDIKA TOR	REALISA SI INDIKAT OR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$
1	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.850.000,00	1.833.700,00	99,11
1.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	1.850.000,00	1.833.700,00	99,11
1.1.1	Sinergitas degan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1.850.000,00	1.833.700,00	99,11
2	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	11.075.000,00	5.660.946,00	51,11
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	11.075.000,00	5.660.946,00	51,11
2.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	11.075.000,00	5.660.946,00	51,11
JUMLAH				12.925.000,00	7.494.646,00	57,98

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 realisasi biaya untuk menunjang indikator kinerja pada Kecamatan 2x11 Anam Lingsung diserap sebesar Rp 7.494.646,00 atau 57,98% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 12.925.000,00.

4) Analisis faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan Kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

Faktor Pendukung

1. Terjalannya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Nagari, terus bersinergi dengan TNI/POLRI dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan

Faktor Penghambat

1. Terbatasnya pagu anggaran serta pengetatan pencairan anggaran
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
3. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

Solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diTingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen bersama antara pimpinan dan staf kecamatan akan kelancaran kegiatan
2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
4. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi
5. Meningkatkan kualitas budaya birokrasi

6. Meningkatkan kualitas inovasi birokrasi dan teknologi informasi
7. Meningkatkan kualitas sistem dan strategi pelayanan
8. Meningkatkan kualitas kepemimpinan

5). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel pebandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisisnesi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel. 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA ($\geq 100\%$)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=3-4
Meningkatan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	57,98	42,02 %

Dalam menunjang capaian kinerja ini Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang menganggarkan pembiayaan sebesar Rp. **12.925.000,00** dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.**7.494.646,00** dengan persentase realisasi keuangan sebesar 57,98%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 57,98% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 42,02%.



Sasaran 2:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 5 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan.

1). Perbandingan Target dan Realisasi capaian IKU Tahun 2025

Tabel. 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Interprestasi
	Target	Realisasi	%	
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (85)	B (85)	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan yaitu B (85) mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinetrjanya 100% yang di kategorikan “ berhasil”.

2) . Perbandingan Realisasi IKU Pada Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel. 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian(%)	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	%	100	100%	100%	B(85)	B (85)	100	Berhasil

Pada tabel 3.5.11 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Tahun 2025 mencapai sebesar 85 (B). Ini dikarenakan adanya kerja sama Kecamatan dengan OPD se Kabupaten serta stakeholder terkait seperti KUA, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Perangkat Nagari serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehingga kegiatan terlaksana dengan lebih baik. Adanya komitmen antara camat dengan jajaran dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan di Kantor camat 2x11 Anam Lingsuang, Pemerintah Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

3). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi capain IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Nilai	B	B	B	B	B	100	100	100	B	B

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mencapai target dengan interpretasi “Berhasil”. Ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

4). Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025.

Tabel 3.20
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 2

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 9 (sembilan) sekolah

Tabel 3.21
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9	9	UKS

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya terlaksananya kegiatan penerbitan surat rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat-surat masuk sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) surat.

Tabel 3.22
Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1500	1470	Surat

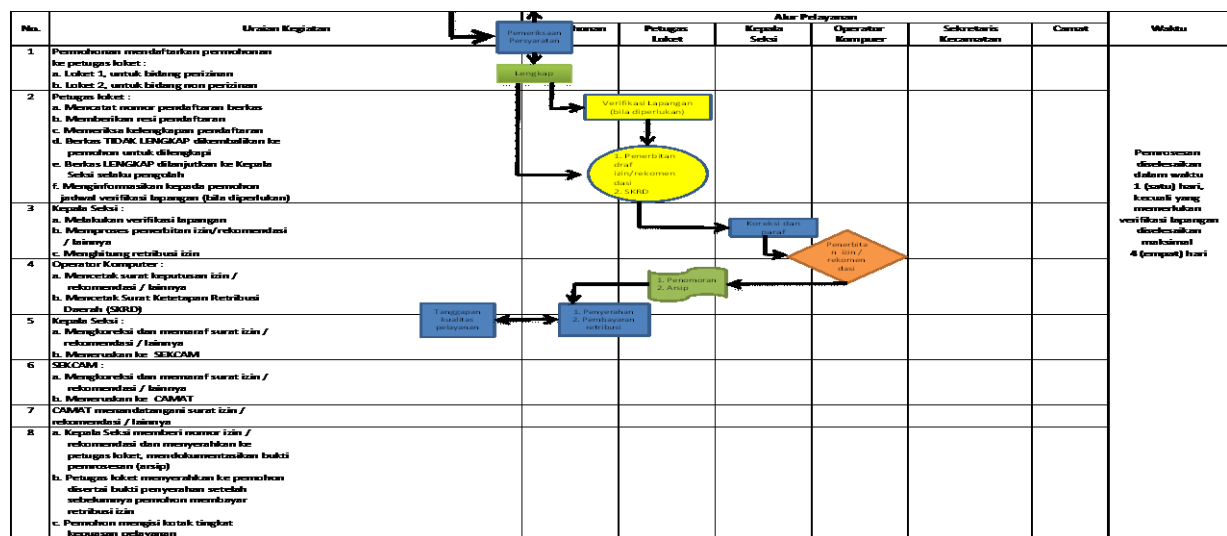
Gambar 3.3
Pelayanan pada masyarakat



Gambar 3.4
Kafilah se-Kec. 2x11 Anam Lingkuang pada acara MTQ Nasional Ke 49
Tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman di
Nagari Lubuk Pandan



Gambar 3.5
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 2x11 Anam Lingsu dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan 2x11 Anam Lingsu serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah, membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- c. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- d. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- e. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

Tabel 3.23
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	7.230.000,00	7.219.730,00	99,85
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	5.980.000,00	5.969.730,00	99,82
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.980.000,00	5.969.730,00	99,82
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	1.250.000,00	1.250.000,00	100
1.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1800	1600	1.250.000,00	1.250.000,00	100

Dalam mencapai kinerja realisasi anggaran yang telah diserap sebesar Rp 7.219.730,00 atau 99,85% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7.230.000,00. hal ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dengan linsek dan stakeholder Kecamatan, perangkat nagari serta masyarakat guna mensukseskan kegiatan MTQ ke- 50 Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan di Nagari Lubuak Pandan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

5) Analisis Faktor Pendukung/ Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang diharapkan

Adapun beberapa faktor penghambat dan penentu keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 adalah :

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang di Kecataman 2x11 Anam Lingkuang
2. Kurangnya kapasitas SDM di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
3. Masyarakat ada yang belum mengetahui tentang SOP Pelayanan;

Faktor pendukung

1. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
2. Koordinasi dan komitmen antara Pimpinan dan Staf
3. Adanya monev capaian kinerja secara berkala

Solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Meningkatkan Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dari semua sektor untuk mendukung kelancaran kegiatan di tahun berikutnya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan serta penyederhanaan alur pelayanan
3. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait

4. Mengimplementasikan SOP dalam pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
7. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pelayanan prima

6). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel pebandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisisnesi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel. 3.24

Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Kepuasan Masyarakat	100	99,85	0,15

Untuk mencapai capaian kinerja ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 7.230.000,00. Dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.7.219.730 ,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,85%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 99,85% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien dengan tingkat efisiensi 0,15%.

	Sasaran 3: <i>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangun</i>
---	--

Meningkatkan Kualitas Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah.

1). Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Tabel. 3.25

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	87,47	87,47%	Berhasil

a) Perbandingan Realisasi IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian(%)	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	96,50 %	96,50%	100	87,47	87,47%	Berhasil

Pada tabel 3.5.19 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah tahun 2025 mencapai sebesar 96,50%. Ini dikarenakan adanya kerja sama Kecamatan dengan stakeholder terkait, perangkat Nagari serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehingga kegiatan terlaksana dengan lebih baik dalam pembangunan daerah.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	-	-	-	96,50	87,47

Realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mencapai 100 % dengan interpretasi “ Sangat Berhasil”. Ini terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara Kecamatan dengan pihak terkait seperti Nagari, PKK dan partisipasi Puskesmas serta elemen masyarakat dalam pembangunan diwilayah Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang.

c) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang tahun 2025 (Tabel 3.5.21)

Tabel 3.28

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3

Program	Kegiatan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan .
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 3 (tiga) organisasi PKK.

Tabel 3.29

Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	1	1	kegiatan
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	4	4	kegiatan

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang yang terdiri dari 3 (tiga) Nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan Musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang yang melibatkan seluruh nagari-nagari yang ada di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Gambar 3.6
Acara Musrenbang Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025



Gambar 3.7
Kegiatan PKK Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025



1.2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa dari 3 Nagari yang ada di kecamatan

.Tabel 3.30
Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	Laporan
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	Laporan

Gambar 3.8
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari-Nagari
se-Kec. 2x11 Anam Lingsuang



Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang :

Tabel 3.31
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	18.775.000,00	10.947.500,00	58,30
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	18.775.000,00	10.947.500,00	58,30
1.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	3 Nagari	3 Nagari	3.560.000,00	3.114.000,00	87,47
1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	10 Lembaga	10 Lembaga	15.215.000,00	7.833.500,00	51,482

2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	1.730.000,00	1.680.000,00	97,10
2.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	1.730.000,00	1.680.000,00	97,10
2..1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	950.000,00	900.000,00	94,73
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	780.000,00	780.000,00	100
JUMLAH				20.505.000,00	12.627.500,00	61,58

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp 12.627.500,00 atau 61,58% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20.505.000,00.

d) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Kurangnya prioritas usulan musrenbang yang ditetapkan Kabupaten
2. Sumber daya alam yang tidak memadai
3. Kebudayaan daerah yang masih kuat
4. Kurangnya pemahaman masyarakat
5. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

Faktor pendukung

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang
2. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
3. Koordinasi yang bagus dengan lintas sektor dan Nagari

Solusi/ alternatif yang diharapkan

1. Mensosialisasikan peran dan tanggung jawab perangkat desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat
2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami kepentingan dan kebutuhan mereka
4. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
5. Meningkatkan koordinasi dengan nagari dalam percepatan penyusunan dokumen administrasi nagari

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.32

Analisis Efesiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	61,58	38,42

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk kegiatan indikator kinerja ini adalah , Rp. 12.627.500,00 sedangkan target sebesar Rp. 20.505.000,00, dengan realisasi anggaran sebsar 61,58%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 38,42%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 61,58% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien, dengan tingkat efisiensi 38,42.

**Sasaran 4:****Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan kecamatan terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat.

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU pada Tahun 2025

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan :

Tabel. 3.33

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan
2x11 Anam Lingkup Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (81,0)	BB (75,60)	93,33	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan total nilai sebesar 75,60 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “BB” kategori Sangat Baik. Hasil ini masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai A (81,0), sehingga capaian kinerja nya dikategorikan “berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah
Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB	BB (70,05)	100	A (81,0)	BB (75,600)	93,33	Berhasil

Pada tabel 3.5.26 diatas diketahui bahwa capaian kinerja dari Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan nilai BB (75,60), mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai BB (70,05), meningkat sebanyak 5,55, dengan kategori nilai “ Sangat Baik”.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB	BB	A	B	B	BB (71,95)	BB (70,05)	BB (75,60)

Realisasi indikator kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat mengalami penurunan dari 2023 ke 2024 yaitu mencapai nilai BB (70,05). Pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dengan nilai BB (75,60) dengan interpretasi “ Sangat Berhasil”.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya komitmen bersama antara Camat dengan jajaran dalam menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan secara berkala dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di kecamatan 2x11 Anam Lingsuang.

d) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan 2x 11 Anam Lingsuang tahun 2025 (Tabel 3.5.28)

Tabel 3.36
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 1. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan sebanyak 4 (empat) dokumen.
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 1. Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.37

Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Gambar 3.9
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor - faktor keberhasilan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1. Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan

Tabel 3.38

Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Bulan

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025

1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 18 buah.

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 20 buah

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 325 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.39

Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	18	18	Buah
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	20	Buah
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	125	125	kotak

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	200	200	orang

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama sebanyak 1470 arsip selama 1 tahun
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (dua belas) bulan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola sebanyak 2 (dua) orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.40
Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	1470	Arsip
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tagihan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 2 (dua) unit kendaraan dinas
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 1. Terpenuhinya jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara selama 1 tahun.

Tabel 3.41

**Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18	18	Unit
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Bangunan kantor	1	1	unit

Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang:

Tabel 3.42

Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100$
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	687.771.726,00	596.802.957,00	86,77
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	7.155.000,00	6.930.000,00	96,85
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3.315.000,00	3.170.000,00	95,62
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.840.000,00	3.760.000,00	97,91

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	470.942.986,00	445.828.338,00	94,66
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	12 Orang	437.462.986,00	413.248.338,00	94,46
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	33.480.000,00	32.580.000,00	97,31
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	7.932.500,00	220.000,00	2,77
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15	stel	7.492.500,00	0	0
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	orang	440.000,00	220.000,00	50
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	82.672.900	69.681.500,00	84,28
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 item	20 item	1.000.000,00	500.000,00	50
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0	0	0
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18 item	18 item	1.942.900,00	1.930.000,00	99,33
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	75.980.000,00	64.116.500,00	84,38
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125 Laporan	125 Laporan	3.750.000,00	3.135.000,00	83,6
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	86.443.340,00	44.484.056,00	51,46
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 surat	1.375 surat	11.275.900,00	10.635.000,00	94,31
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12.100.000,00	8.649.056,00	71,47
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0	0	0
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	2 orang	63.067.440,00	25.200.000,00	39,95
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.500.000,00	5.500,00,00	100
1.6.1	Pengadaan Mebel	N/A	N/A	0	0	0
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	5.500,00,00	100

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	27.125.000,00	24.159.063,00	89,06
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 unit	20.675.000,00	17.848.063,00	86,32
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	18 unit	3.950.000,00	3.920.000,00	99,24
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	2.500.000,00	2.391.000,00	95,64

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp **596.802.957,00** atau 86,77% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. **687.771.726 ,00**. Realisasi ini rendah disebabkan pada pertengahan tahun 2025 Gaji Swakelola dibayarkan untuk 1 orang, karena 1 dari Tenaga Swakelola dinyatakan lulus PPPK Penuh, sehingga berdampak pada realisasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

e) Analisis Faktor pendukung / Penghambat Keberhasilan Pencapaian kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Faktor Pendorong

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan
2. Optimalisasi SDM , sarana dan prasarana
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja

Faktor penghambat

1. Kurangnya kapasitas SDM di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
2. Kurangnya sarana dan Prasarana pendukung
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

Alternatif/ solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.
2. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana
5. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.
7. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
8. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
9. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja
10. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset .
11. Peningkatan kualitas manajemen kinerja berbasis hasil, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.43
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	93,33	86,77%	6,56

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp. **596.802.957,00** sedangkan target sebesar Rp. **687.771.726,00** ,dengan realisasi anggaran sebesar 86,77%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 6,56%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 86,77% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien, dengan tingkat efisiensi 6,56.

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang pada tahun 2025 menyelesaikan banyak program Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Target Kinerja tahunan dan juga penambahan beban kerja tahun berjalan baik dari pemerintah daerah melalui penerbitan regulasi baru terkait peraturan pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap penyesuaian dan tindak lanjut yang melahirkan kebijakan-kebijakan di tingkat Kecamatan. Selain itu juga faktor Internal dan External lainnya membutuhkan penanganan cepat, sehingga menambah beban kerja tahun 2025.

Sesuai target kinerja yang telah dicapai pada RPJMD 2021-2026 dan telah diturunkan melalui Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2021-2026, maka capaian target kinerja di akhir tahun anggaran telah dicapai 100 %. Proses pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 yang disertai dengan adanya rasionalisasi anggaran, sehingga berdampak terhadap kinerja dari porsi anggaran yang telah disediakan. Dalam hal anggaran berbasis kinerja, dampak

yang mempengaruhi anggaran sangat menentukan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dengan berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan capaian target kinerja, telah berhasil menggunakan efisiensi anggaran belanja dan langkah efisiensi lainnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap diraihinya capaian kinerja serta IKU yang ditetapkan 100%. Adapun dalam menghitung capaian target kinerja tersebut dapat di formulasikan sebagai berikut :

Formulasi Capaian Target Kinerja : Realisasi Belanja/Target Anggaran x 100%

Dimana target anggaran pada DPA perubahan tahun 2025 adalah senilai Rp. 728.431.726,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 624.144.833,00 atau sebesar 85,68 % berdasarkan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025.

3.5 ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG/FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara Umum program dan kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan pada Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik, namun realisasi anggaran tidak bisa terserap secara maksimal pada beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Kegiatan PKK). Hal ini disebabkan karena kegiatan PKK kurang berjalan secara maksimal.
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Hal ini disebabkan oleh adanya tenaga swakelola yang lulus PPPK sehingga anggaran tidak terserap secara maksimal.
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan Upacara HUT RI tidak diselenggarakan di Kecamatan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Hal ini disebabkan karena tidak disetujuinya belanja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya oleh bagian keuangan BPKD Kabupaten Padang Pariaman.

Realisasi kinerja dapat dilakukan secara maksimal, hal ini bisa terlihat dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 624.144.833,00 dari total Pagu Anggaran sebesar Rp. 728.431.726,00 atau Realisasi sebesar 85,68 % dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa untuk bisa mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan memiliki faktor pendukung/faktor penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Kinerja

- a. Optimalisasi sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana
- b. Adanya sinergi antara Pimpinan dan staf
- c. Penanaman kesadaran untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan.
- d. Adanya fasilitas Komputer dan Jaringan Internet yang memadai.
- e. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya

2. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

- a. Terbatasnya pagu anggaran dan pengetatan pencairan anggaran
- b. Kurangnya kualitas pelayanan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- d. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas di bidangnya
- e. Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

3.6) Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Camat 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025 sesuai Renstra Kec. 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025-2029 :

Sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, laporan berikut analisis mendalam mengenai capaian kinerja Kantor Camat 2x11 Anam Lingsuang sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini memotret secara objektif sejauh mana sasaran strategis yang diamanatkan dalam Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025–2029 telah terwujud sebagai kontribusi nyata bagi pencapaian target RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.



Sasaran 1

Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan.

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Tabel. 3.6.1

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan.	100	75,11%	75,11%	Berhasil

Dari Tabel diatas dapat dilihat Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang yaitu 75,11% dengan dikategorikan “ berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.2

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Targ et	Realis asi	Capai an(%)	Targ et	Realis asi	Capaian (%)	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	99,2 %	99,2%	100	75,11 %	75,11%	Berhasil

Pada tabel 3.5.2 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025 terdapat penurunan. Ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6.3

Perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,2	75,11

Realisasi indikator kinerja persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami penurunan, tapi masih dalam kategori “Berhasil”. Penurunan ini terjadi karena adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

d) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang tahun 2025 (Tabel 3.5.4)

Tabel 3.6.4
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	3. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang (Tabel 3.6.5)

Tabel. 3.6.5**Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penanganan Kentrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi Dan Dilaporkan**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Sinergitas degan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan

1.2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025 serta kegiatan pendistribusian seperti bantuan sosial (untuk masyarakat kurang mampu), bantuan pangan, bantuan kebutuhan dasar, serta bantuan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga penerima manfaat tertentu.

Tabel. 3.6.6**Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum****Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	50	50	Orang
2	Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh isntansi vertikal	1	1	Laporan

1.3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini disusun dan dilaksanakan 2 kegiatan pencapaian terget kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 2x11 Anam Lingsung dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat melalui kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tabel. 3.6.7

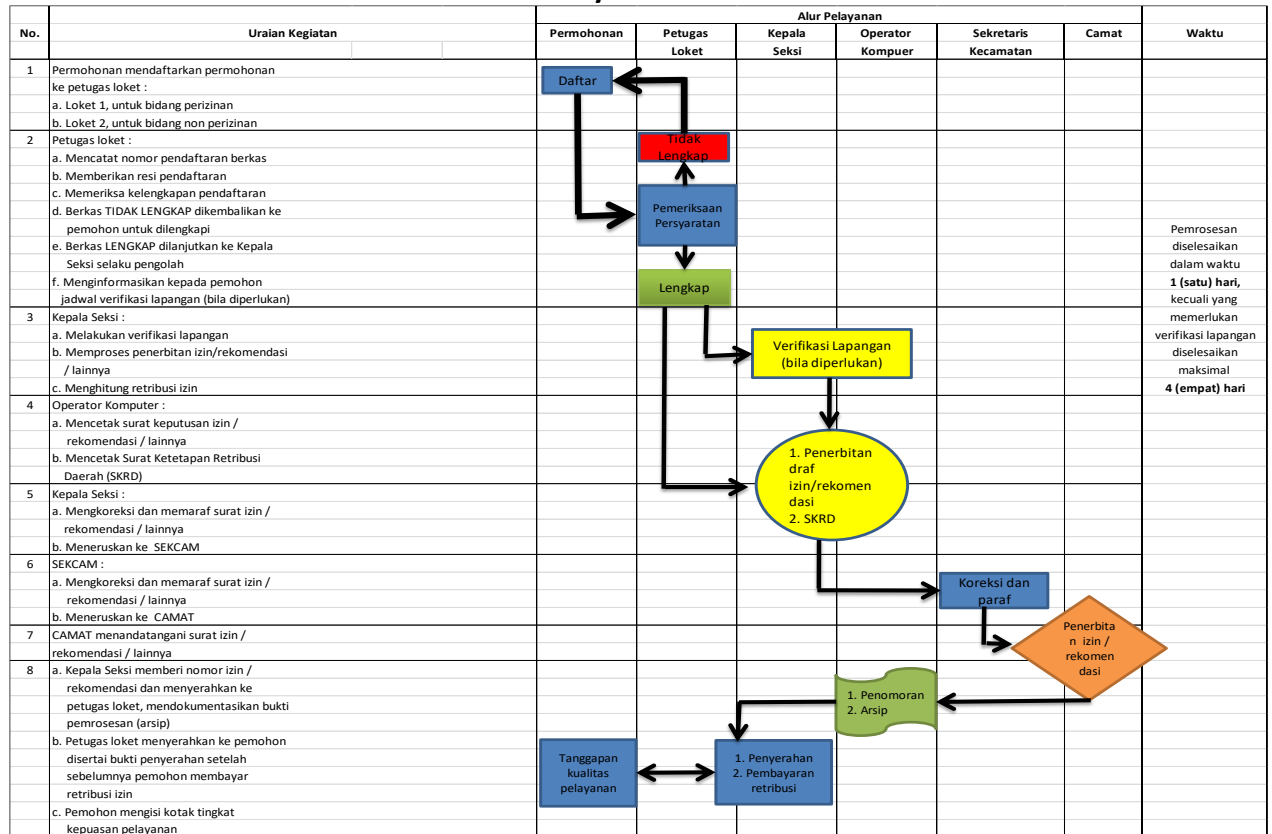
Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	Dokumen
2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1500	1470	Surat

Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari stokeholder terkait di lingkungan Kecamatan 2x11 Anam Lingsung serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingsung
- b.** Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- d. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di Kecamatan
- e. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang dberikan oleh Kecamatan.
- f. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di Kecamatan

Gambar 3.5
Alur Pelayanan PATEN



Pelayanan di Kecamatan meliputi pelayanan perizinan, pelayanan umum, dan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan perizinan terdiri dari :

1. Rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Rekomendasi izin keramaian
3. Rekomendasi surat pengantar pembuatan IMB
4. Rekomendasi surat pengantar pembuatan SKCK
5. Rekomendasi surat pengantar keterangan domisili
6. Rekomendasi surat keterangan pindah penduduk
7. Rekomendasi surat keterangan belum menikah

Berikut tabel analisis Program dan kegiatan tiap indikator kinerja dan anggaran Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Tabel 3.6.8

Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100
1	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.850.000,00	1.833.700,00	99,11
1.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	1.850.000,00	1.833.700,00	99,11
1.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1.850.000,00	1.833.700,00	99,11
2	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	11.075.000,00	5.660.946,00	51,11
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	11.075.000,00	5.660.946,00	51,11
2.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	11.075.000,00	5.660.946,00	51,11
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	7.230.000,00	7.219.730,00	99,85
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	5.980.000,00	5.969.730,00	99,82
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.980.000,00	5.969.730,00	99,82
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	1.250.000,00	1.250.000,00	100
1.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1800	1600	1.250.000,00	1.250.000,00	100
JUMLAH				20.155.000,00	14.714.376,00	73,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 realisasi biaya untuk menunjang indikator kinerja pada Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang diserap sebesar Rp 14.714.375,00 atau 73,00% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20.155.000,00.

e) Analisis Faktor Pendukung/ Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang diharapkan

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 adalah :

Faktor Pendukung

1. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
2. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait dan instansi vertikal yang ada di lingkungan Kecamatan khususnya KUA sebagai mitra dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
2. Kurangnya sarana prasarana yang memadai dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan
3. Kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan
4. Kurangnya pemanfaatan administrasi secara optimal
5. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi

Solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen bersama antara Pimpinan dan Staf Kecamatan akan kelancaran kegiatan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur
3. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi
4. Meningkatkan kualitas budaya birokrasi
5. Meningkatkan kualitas inovasi birokrasi dan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas sistem dan strategi pelayanan
7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel pebandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisisnesi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel. 3.6.9

Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA ($\geq 100\%$)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=3-4
Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	73,00	27%

Dalam menunjang capaian kinerja ini Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp.20.155.000,00 dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 14.714.376,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 73%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 73% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 27%.



Sasaran 2

Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

Meningkatkan Kualitas Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah.

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Tabel. 3.6.10

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	100%	Sangat Berhasil

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah yaitu 100% mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja nya 100% yang dikategorikan “sangat berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.11

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian(%)	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100%	100%	75	75	100%	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah tahun 2025 mencapai sebesar 100%. Ini dikarenakan adanya kerja sama Kecamatan dengan stakeholder terkait, perangkat Nagari serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehingga kegiatan terlaksana dengan lebih baik dalam pembangunan daerah.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6.12

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100

Realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mencapai 100 % dengan interpretasi “ Sangat Berhasil”. Ini terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara Kecamatan dengan pihak terkait seperti Nagari, PKK dan partisipasi Puskesmas serta elemen masyarakat dalam pembangunan diwilayah Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

d) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang tahun 2025 (Tabel 3.6.3)

Tabel 3.6.13

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2

Program	Kegiatan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 3 (tiga) organisasi PKK.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang yang terdiri dari 3 (tiga) nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang yang melibatkan seluruh nagari-nagari yang ada di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Tabel 3.6.14
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	1	1	kegiatan
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	4	4	Dokumen

1.2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari 3 Nagari yang ada di kecamatan, pengajuan ADN tahap I,II,III telah sesuai dengan target bulanannya yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

Tabel 3.6.15

Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	Laporan
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	laporan

Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang :

Tabel 3.6.16

Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	18.775.000,00	10.947.500,00	58,30
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	18.775.000,00	10.947.500,00	58,30
1.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	3 Nagari	3 Nagari	3.560.000,00	3.114.000,00	87,47
1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	10 Lembaga	10 Lembaga	15.215.000,00	7.833.500,00	51,482

2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	1.730.000,00	1.680.000,00	97,10
2.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	1.730.000,00	1.680.000,00	97,10
2.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	950.000,00	900.000,00	94,73
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	780.000,00	780.000,00	100
JUMLAH				20.505.000,00	12.627.500,00	61,58

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp 12.627.500,00 atau 61,58% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20.505.000,00.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Kurangnya prioritas usulan musrenbang
2. Sumber daya alam yang tidak memadai
3. Kebudayaan daerah yang masih kuat
4. Kurangnya pemahaman masyarakat
5. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

Faktor pendukung

1. Adanya Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang
2. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
3. Adanya Koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan Nagari

Solusi/ alternatif yang diharapkan

1. Mensosialisasikan peran dan tanggung jawab perangkat desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat

2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami kepentingan dan kebutuhan mereka
4. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
5. Meningkatkan koordinasi dengan nagari dalam percepatan penyusunan dokumen administrasi nagari.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.6.17

Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	61,58	13,42

Realisasi biaya untuk kegiatan indikator kinerja ini adalah , Rp. 12.657.500,00 sedangkan target sebesar Rp 20.505.000,00,dengan realisasi anggaran sebsar 61,58%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 13,42%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 75%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 61,58% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien, dengan tingkat efisiensi 13,42.



Sasaran 3

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan kecamatan terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU pada Tahun 2025

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan :

Tabel. 3.6.18

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingkung Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (75,0)	BB (75,60)	100,8	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan total nilai sebesar 75.60 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “BB” kategori Sangat Baik. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai BB (75), sehingga capaian kinerjanya dikategorikan “Sangat Berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.19

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian(%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB (70,05)	100	BB (75,00)	BB (75,60)	100,8	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.5 diatas diketahui bahwa capaian kinerja dari Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan nilai BB (75,60), mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai BB (70,05), meningkat sebanyak 5,55 dengan kategori nilai “Sangat Baik”.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6.20

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB (71,95)	BB (70,05)	BB (75,60)

Realisasi indikator kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat mengalami penurunan dari 2023 ke 2024 yaitu mencapai nilai BB (70,05). Pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dengan nilai BB (75,60) dengan interpretasi “Sangat Berhasil”.

Hasil ini menunjukan bahwa adanya komitmen bersama antara Camat dengan jajaran dalam menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan secara berkala dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

d) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025 (Tabel 3.6.11)

Tabel 3.6.21
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan 2x11 Anam Lingsung dan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

* Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

*Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan sebanyak 4 (empat) dokumen.

Tabel. 3.6.22
Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Faktor - faktor keberhasilan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1. Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan

Tabel 3.6.23

Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Dokumen

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025

1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 18 buah.

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 20 buah

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 200 orang selama 1 (satu) tahun

d. Fasilitasi Kunjungan tamu

1. Terfasilitasinya tamu yang datang untuk 125 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.6.24**Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	18	18	Buah
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	20	Buah
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	125	125	kotak
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	200	200	orang

Tabel 3.6.25**Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	18	18	Buah
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	20	paket
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	300	300	Laporan
4.	Fasilitasi Jamuan tamu	125	125	Laporan

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama sebanyak 1470 arsip selama 1 tahun

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (dua belas) bulan

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola sebanyak 2 (dua) orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.6.26**Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 2 (dua) unit kendaraan dinas
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 1. Terpenuhinya jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara selama 1 tahun.

Tabel 3.6.27**Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	20	Unit
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Bangunan kantor	1	1	unit

Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang :

Tabel 3.6.28
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	4	5	6=5/4 *100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	687.771.726,00	596.802.957,00	86,77
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	7.155.000,00	6.930.000,00	96,85
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3.315.000,00	3.170.000,00	95,62
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.840.000,00	3.760.000,00	97,91
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	470.942.986,00	445.828.338,00	94,66
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	12 Orang	437.462.986,00	413.248.338,00	94,46
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	33.480.000,00	32.580.000,00	97,31
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	7.932.500,00	220.000,00	2,77
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15	stel	7.492.500,00	0	0
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	orang	440.000,00	220.000,00	50
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	82.672.900	69.681.500,00	84,28
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 item	20 item	1.000.000,00	500.000,00	50
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0	0	0
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18 item	18 item	1.942.900,00	1.930.000,00	99,33
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	75.980.000,00	64.116.500,00	84,38
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125 Laporan	125 Laporan	3.750.000,00	3.135.000,00	83,6
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	86.443.340,00	44.484.056,00	51,46

1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 surat	1.470 surat	11.275.900,00	10.635.000,00	94,31
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12.100.000,00	8.649.056,00	71,47
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0	0	0
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	1 orang	63.067.440,00	25.200.000,00	39,95
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.500.000,00	5.500.00,00	100
1.6.1	Pengadaan Mebel	N/A	N/A	0	0	0
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	5.500.00,00	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	27.125.000,00	24.159.063,00	89,06
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 unit	20.675.000,00	17.848.063,00	86,32
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	18 unit	3.950.000,00	3.920.000,00	99,24
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	2.500.000,00	2.391.000,00	95,64

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp **596.802.957,00** atau 86,77% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. **687.771.726 ,00**. Realisasi ini rendah disebabkan pada pertengahan tahun 2025 Gaji Swakelola dibayarkan untuk 1 orang, karena 1 dari Tenaga Swakelola dinyatakan lulus PPPK Penuh, sehingga berdampak pada realisasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

e) Analisis Faktor pendukung / Penghambat Keberhasilan Pencapaian kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Faktor Pendorong

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan
2. Optimalisasi SDM , sarana dan prasarana

Faktor penghambat

1. Kurangnya kapasitas SDM di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
2. Kurangnya sarana dan Prasarana pendukung
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

Alternatif/ solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.
2. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana
5. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.
7. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
8. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
9. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja
10. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset .

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.6.29
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,8	86,77	14,03

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp. **596.802.957,00** sedangkan target sebesar Rp. **687.771.726,00** ,dengan realisasi anggaran sebesar 86,77%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 14,03%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 86,77% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien, dengan tingkat efisiensi 14,03.

C.Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka belanja tahun 2025 Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan anggaran belanja pada rekening belanja operasional dan belanja modal. Dimana anggaran total belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 728.431.726,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 624.144.833,00 atau sebesar 85,68%. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 413.248.338,00 atau 94,46%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 205.396.495,00 atau 71,95% dan belanja modal sebesar Rp. 5.500.000,00 atau 100%. Penyebab belum tercapainya target 100% adalah adanya efesiensi dalam penggunaan anggaran belanja, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan serta kurang maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang. Namun hal ini tidak mengurangi kualitas dan capaian kinerja program dan kegiatan yang ada.

Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja tahun 2025 di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.27
Realisasi Anggaran kinerja dan efisiensi Anggaran Tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.155.000,-	6.930.000,-					

		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.315.000,-	3.170.000,-	95,62	Tersedianya 6 dokumen perencanaan dan keuangan	1 paket	1 paket	100%
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.840.000,-	3.760.000,-	97,91	Tersedianya 4 dokumen laporan perencanaan dan keuangan	1 paket	1 paket	100 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	470.942.986,-	445.828.338,-					
		a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	437,462.986,-	413.248.338,-	94,46	Tersedianya TPP ASN	14 bulan	14 bulan	100 %
		b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.480.000,-	32.580.000,-	97,31	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	12 bulan	12 bulan	100 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.932.500	220.000,-					
		a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	7.492.500,-	0,-	0	Tidak terlaksana pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Keg	-	-
		a. Bimbingan Teknis Implementasi	440.000,-	220.000,-	50	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2 kegiatan	1 kegiatan	50 %

		Peraturan Perundang-Undangan				Perundang-undangan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.672.900,-	69.681.500,-					
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,-	500.000,-	50,00	Tersedianyan alat – alat Listrik	1 Paket	1 Paket	50%
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.942.900,-	1.930.000,-	99,33	Tersedianya alat-alat dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		c. Fasilitas Kunjungan Tamu	3.750.000,-	3.135.000,-	83,60	snack & minum Tamu	1 Paket	1 Paket	100%
		d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	75.980.000,-	64.116.500,-	84,38	Kunjungan/menghadiri rakor & konsultasi	100%	100%	100%
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000,-	5.500.000,-		Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	100%	100%	100%

		f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,-	5.500.000,-	100	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	1	1	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.443.340	44.484.056,-	51,46				
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.275.900,-	10.635.000,-	94,31	ATK,Kertas dan Cover,Materai, cetak/penggandaan, alat/bahan komputer	1 paket	1 paket	100%
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.100.000,-	8.649.056,-	71,47	Lunas Tagihan Listrik dan PDAM	12 bulan	12 bulan	100%
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.067.440,-	25.200.000,-	39,95	Honorarium Tenaga Administrasi 2 orang (1 orang dibayarkan penuh 12 bulan dan 1 orang dibayarkan 3 bulan karena lulus PPPK)	12 Kali	12 Kali	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.125.000,-	24.159.063,-					

		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.675.000,-	17.848.063,-	86,32	BBM, suku cadang & STNK Kend. Dinas dan Kendaraan Operasional	2 Unit	2 Unit	100%
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.950.000,-	3.920.000,-	99,24	Terpeliharanya peralatan kantor (ac,set PC, lap top, printer)	1 paket	1 paket	100%
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000,-	2.391.000,-	95,64	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	1 paket	100%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.980.000,-	5.969.730,-					
		a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	5.980.000,-	5.969.730,-	99,82	Jumlah uks yang dibina	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	1.250.000,-	1.250.000,-					
		a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.250.000,-	1.250.000,-	100,00	Pelayanan administrasi Kecamatan	1 Paket	1 Paket	100%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.775.000,-	10.947.500,-	58,30				
		b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	3.560.000,-	3.114.000,-	87,74	Terlaksananya musrenbang dan usulan prioritas pembangunan di kecamatan	1 keg	1 keg	100%
		c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.215.000,-	7.833.500,-	51,48	Terselenggaranya kegiatan PKK,dll	1 paket	1 paket	100%

4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.850.000,-	1.833.700,-					
		a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.850.000,-	1.833.700,-	99,11	Terlaksana Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bln	12 bln	100 %
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemnyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.075.000,-	5.660.946,-					
		a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	11.075.000,-	5.660.946,-	51,11	Terlaksananya kegiatan HUT RI	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %

		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
		b. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.	0,-	0,-					
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.730.000,-	1.680.000,-					

		a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	950.000,-	900.000,-	94,73	SPPD	12 bln	12 bln	100%
		b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	780.000,-	780.000,-	100	SPPD	12 bln	12 bln	100%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat 2x11 Anam Lingsu adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja **Kantor Camat 2x11 Anam Lingsu** pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan fasilitas pelayanan kehidupan beragama di Kecamatan melalui program peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan kegiatan peningkatan pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan, kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan dan pembinaan serta pelaksanaan MTQ.
- 2) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur **Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang** mengharapkan Laporan Kinerja **Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang** Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi **Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang** Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program **Kantor Camat 2x11 Anam Lingkuang** Tahun 2025.

Sicincin , 20 Januari 2026

Camat 2x11 Anam Lingkuang



ARDINAL, SH

NIP. 19710716 200604 1 011

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA CAMAT TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDINAL, SH

Jabatan : Camat 2x11 Enam Lingkung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sicincin, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUHATRI BUR

ARDINAL, SH
NIP.19710716 200604 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
CAMAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	85
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.	81 (A)

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 806.071.669,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp 6.870.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 30.480.000,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.200.000,-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp 9.000.000,-	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 7.191.500,-	
	Jumlah	Rp 862.813.169,-	

BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR

Sicincin, 02 Januari 2025
CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG



ARDINAL, SH
NIP.19710716 200604 1 011

LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN CAMAT TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDINAL, SH

Jabatan : CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

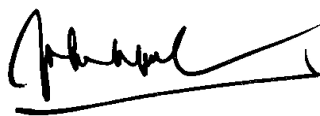
1. Mewujudkan target sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Meenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan Upaya Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di Wilayah Kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Sicincin, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,


ARDINAL, SH

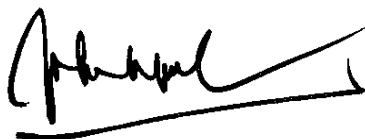
NIP.19710716 200604 1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG
CAMAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,00

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 687.771.726,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp 7.230.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 18.775.000,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.850.000,-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp 11.075.000,-	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 1.730.000,-	
	Jumlah	Rp 728.431.726,-	

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

Sicincin, 23 Oktober 2025
CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG



ARDINAL, SH
NIP.19710716 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km 45 Sicincin, Kode Pos : 25584

Email:kecamatan2x11enamlingkung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT 2x11 ANAM LINGKUANG
NOMOR : 08/KEP/CSC/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN 2X11 ANAM
LINGKUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan 2X11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029 maka perlu menerapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan 2X11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat 2X11 Anam Lingkuang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan 2X11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3699);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat 2X11 Anam Lingkuang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan 2X11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sicincin
pada tanggal 03 Maret 2025
CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



ARDINAL, SH
NIP. 197107162006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT 2X11 ANAM LINGKAUNG
NOMOR : 08/KEP/CSC/2025
TANGGAL : 03 Maret 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Jumlah Penilaian masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Kasi Yanum
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Presentase Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah partisipasi masyarakat X 100 %	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	Kasi PM
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review TIM Sakip Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kasubag umum Kepegawaian

Camat 2x11 Anam Lingkuang

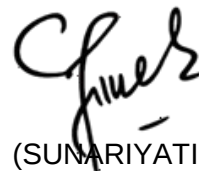


ARDINAL, SH
NIP. 19710716 2006041011

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN 2 x 11 ANAM LINGKUANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluatur,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	